

Membangun Kemampuan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Rontu

Building MSME Capabilities in the Context of Increasing the Revenue of the Rontu Village Community

Nafisah Nurulrahmatiah¹, Kartini Aprianti², Mulyadin³, Intisari Haryanti⁴, Aliah Pratiwi⁵, M. Rimawan⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Manajemen STIE Bima

Email: nafisahrahmatia@gmail.com, kartinaprianti93@gmail.com, intisariharyanti@gmail.com, aliahpratiwi@gmail.com, rimawan111@mail.com

Alamat: Bima Sakti Motor, Jl. Monginsidi, Sarae, Kec. Rasanae Barat, Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84118, Telepon: (0374) 42556

Article History:

Received: 211 Oktober 2022

Revised: 20 November 2022

Accepted: 28 Desember 2022

Keywords: *UMKM, community Income*

Abstract: MSMEs are one of the sectors that provide great benefits to both the region and the community, with their ability to absorb a large number of workers, this sector addresses the imbalance between the growth of the productive age population and the availability of jobs. In addition, MSMEs also have a positive contribution in increasing the GDP of a region. The priority problem that underlies this training activity is the lack of knowledge and understanding of entrepreneurship considering that most of them are still young. Specifically, the problem in this service is what efforts are made to provide guidance so that you can know and understand entrepreneurship, not having to start a business and manage a business well, in other words, you have to own a business, but also be able to answer challenges and take advantage of existing opportunities. The methods used are lectures, demonstrations, discussions, questions and answers, and companion partners. The results achieved from this Community Service Activity increase community knowledge regarding entrepreneurship, namely the basic concept of MSMEs, development of MSME human resources, and government efforts to advance Indonesian MSMEs.

Abstrak

UMKM adalah salah satu sektor yang memberikan manfaat besar baik bagi daerah maupun masyarakat, dengan kemampuannya untuk menyerap banyak tenaga kerja, sektor ini menjawab ketimpangan antara pertumbuhan penduduk usia produktif dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, selain itu UMKM juga mempunyai kontribusi positif dalam meningkatkan PDB suatu

daerah. Adapun permasalahan prioritas yang mendasari kegiatan pelatihan ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kewirausahaan mengingat sebagian besar diantara mereka masih berumur mudah. Secara khusus masalah dalam pengabdian ini adalah upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memberikan bimbingan agar dapat mengetahui dan memahami kewirausahaan adalah bukan harus memulai suatu usaha dan mengelola usaha dengan baik, dengan kata lain harus memiliki usaha, akan tetapi juga mampu menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Metode yang digunakan adalah ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan mitra pendamping. Hasil yang dicapai dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menambah pengetahuan masyarakat terkait kewirausahaan yaitu konsep dasar UMKM, pengembangan sumber daya manusia UMKM, dan upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia.

Kata Kunci: *UMKM, Pendapatan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Masalah pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap Negara. Di Indonesia angka pengangguran terbanyak justru diciptakan oleh kelompok terdidik. Fenomena rendahnya minat dan motivasi pemuda Indonesia untuk berwirausaha dewasa ini menjadi pemikiran serius berbagai pihak, baik pemerintah, dunia pendidikan, dunia industri, maupun masyarakat. Berbagai upaya dilakukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan terutama merubah mindset para pemuda yang selama ini hanya berminat sebagai pencari kerja (*job seeker*) (Rijal et al. 2021).

Faktor angka pengangguran yang meningkat di Indonesia yaitu banyaknya tenaga kerja yang diarahkan ke sector formal dan tidak berusaha membuat lapangan pekerjaan sendiri atau berwirausaha. Hal ini disebabkan preferensi mereka untuk bekerja di sektor formal daripada menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan. Tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan garis kemiskinan di Indonesia semakin meningkat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2022 mencapai 8,4 juta jiwa. Jumlah tersebut persentasenya mencapai 5,83% dari total angkatan kerja yang berjumlah 144,04 juta jiwa. Sedangkan untuk lapangan kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperkirakan kesempatan kerja di Indonesia terbuka untuk 133,82 juta orang pada 2022. Dari data ini terlihat bahwa lebih banyak masyarakat angkatan kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia. Hal ini akan menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia dimana banyaknya pengangguran tentunya akan berdampak pula terhadap distribusi pendapatan masyarakat di Indonesia.

Dewasa ini, Pemerintah Republik Indonesia sedang gencarnya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewirausahaan dalam rangka mengurangi angka pengangguran, serta secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam rangka membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lainnya (Dewi, 2021). Keberadaan UMKM tidak dapat dihapuskan ataupun dihindarkan dari masyarakat bangsa saat ini. Karena keberadaannya sangat bermanfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha

untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Pada sisi lain, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dari sinilah terlihat bahwa keberadaan UMKM yang bersifat padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami mampu menjadi sebuah wadah bagi masyarakat untuk bekerja.

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu *instrument* untuk menaikkan daya beli masyarakat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter. Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai pihak internal yang dikembangkan, dapat bersinergi dengan Pemerintah melalui program-program kewirausahaan yang diberikan oleh pemerintah baik melalui sosialisasi, pelatihan maupun bantuan dana untuk mengembangkan UMKM.

Pengembangan UMKM sangat perlu dilakukan, terutama oleh generasi muda. Karena dengan meningkatnya wirausahawan dari kalangan generasi muda akan mengurangi pertumbuhan jumlah pengangguran bahkan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Namun pada kenyataannya banyak generasi muda yang lebih tertarik menjadi karyawan dibandingkan dengan menjadi wirausaha muda. Hal ini terjadi karena pendidikan terkait kewirausahaan hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, sedangkan masih banyak generasi muda yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam hal kewirausahaan yaitu dengan memberikan pelatihan kewirausahaan.

Adapun permasalahan prioritas yang mendasari kegiatan pelatihan ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman pemuda tentang kewirausahaan mengingat sebagian besar di antara mereka merupakan remaja-remaja. Secara khusus masalah dalam pengabdian ini adalah upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memberikan bimbingan kepada pemuda agar dapat mengetahui dan memahami kewirausahaan adalah bukan harus memulai suatu usaha dan mengelola usaha dengan baik dengan kata lain harus memiliki usaha, akan tetapi juga mampu menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

METODE

Metode pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan pendekatan penyuluhan dan bimbingan dengan model *active dan participatory learning* melalui ceramah (Hardin dan Dewi, 2018). Selanjutnya dengan metode diskusi (Suardin dan Saputra, 2020).

Diharapkan dengan metode ini dapat menggali segala informasi yang ada pada pengusaha UMKM dan masyarakat di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima.

HASIL

A. Penyampaian Materi

Pada tahap ini, peneliti menyampaikan materi pelatihan (teori) dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab serta praktek sebagai aplikasi dosen sebagai pelaksana terlibat baik dalam membawakan materi teori maupun praktek. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab dan diikuti oleh semua peserta.



Gambar 1. Penyampaian materi terkait kewirausahaan

Penyampaian materi dilakukan secara langsung di aula kantor Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima yang di hadiri oleh masyarakat, UMKM, staf kelurahan rontu, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM serta mahasiswa STIE Bima. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada tanggal 12 September 2022 pada jam 09.00-Selesai dengan materi “Membangun Kemampuan UMKM Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Rontu”. Adapun materi yang diberikan mengenai konsep dasar UMKM, pengembangan sumber daya manusia UMKM, dan upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia.

1) Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Anggraeni et al. 2013).

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sebagaimana Pasal 19 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a) memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan.
- b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
- c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kteativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Dari ketiga aspek tersebut berarti sumber daya manusia merupakan subyek yang terpenting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar dapat menciptakan wirausaha yang mandiri dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat mempengaruhi kualitas produksi yang dihasilkan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat (Anggraeni et al. 2013).

3) Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia

Dalam memajukan UMKM Indonesia berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah melalui program-program yang dilakukan oleh berbagai kementerian, antara lain:

- a) Undang-Undang Cipta Kerja

Dari total keseluruhan jumlah UMKM di Indonesia, sebanyak 64,13 juta merupakan UMK yang masih berada di sektor informal sehingga perlu didorong untuk bertransformasi ke sektor formal. Indonesia masih memiliki kendala dalam perizinan yang rumit serta tumpang

tindih antara regulasi di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu Pemerintah berupaya mengakomodir permasalahan tersebut melalui penyusunan UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020. Salah satu substansi yang diatur adalah mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah berharap melalui UU Cipta Kerja, UMKM dapat terus berkembang dan berdaya saing.

b) Program PEN

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu program yang dicetuskan pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak Covid-19. Program ini juga merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memajukan UMKM, berikut merupakan rincian program PEN untuk UMKM, yaitu: Subsidi bunga/margin, Belanja Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana Pemerintah di perbankan, Penjaminan loss limit kredit UMKM, Pajang penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah, Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi UMKM dan Program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro.

c) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa (suku bunga) atas kredit/pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Tujuan KUR adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan dan memperkuat permodalan UMKM.

d) Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM yang diluncurkan pada tahun 2020. Tujuan Gernas BBI yaitu mendorong national branding produk lokal unggulan untuk menciptakan industri baru dan tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital.

e) Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)

ASEAN Online Sale Day (AOSD) atau Hari Belanja Daring ASEAN merupakan acara belanja yang dilakukan secara serentak oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN. AOSD diselenggarakan bertepatan pada hari ulang tahun ASEAN yaitu 8 Agustus sejak tahun 2020. Peserta AOSD adalah pelaku usaha di Kawasan ASEAN yang menyediakan barang dan jasa melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mempromosikan dan membangun citra produk lokal nusantara ke kancah ASEAN serta mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor produk Indonesia. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat memajukan UMKM, meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia dan tentunya dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan demikian, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibuka sehingga angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini dapat menurun.

B. Mengadakan Tanya Jawab Dengan Peserta Pelatihan

Pada tahapan ini peserta pelatihan yaitu pelaku UMKM, staf kelurahan dan masyarakat Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi pelatihan yaitu membangun kemampuan UMKM dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian pertanyaan dari peserta akan dijawab oleh pemateri.



Gambar 2. Tanya jawab dengan peserta pelatihan

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menambah pengetahuan masyarakat terkait kewirausahaan yaitu konsep dasar UMKM, pengembangan sumber daya manusia UMKM, dan upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih disampaikan kepada STIE Bima, Mahasiswa yang telah membantu kegiatan, Lurah dan staf Kelurahan Rontu yang telah hadir dan menyediakan tempat, pelaku UMKM dan masyarakat Kelurahan Rontu serta perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM yang telah hadir.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, F. D., Hardjito, I., Hayat, A., (2013). Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi kasus pada kelompok usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 1286-1295.
- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi Di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(1), 276-287.
- Hardin, H., & Dewi, I. K. (2018). Pengorganisasian Petani Untuk Menanam Bawang Merah Di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 2(1), 33-41.
- Kurniati, K., Daryyl, D., & Nicholas, N. (2021). Pemberdayaan Umkm Untuk Meningkatkan Pendapatan Melalui Pemasaran Online. *Prosiding Serina*, 1(1), 1697-1700.
- Rijal, S., Hasan, M., Ahmad, M. I. S., Dinar, M., & Tahir, M. I. T. (2021). PKM Literasi Kewirausahaan. In *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Suardin, M. S., Hardin, H., & Saputra, A. (2020). Pelatihan Tukang Kota Baubau Untuk Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Beton (Rigid Pavement). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 4(2), 261-266.